



LAPORAN

PEMBINAAN, EVALUASIDAN
MONITORING
PPID ISI PADANGPANJANG



I. Pendahuluan

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** dan **Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik**, ISI Padangpanjang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah melaksanakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Atasan PPID memiliki kewenangan dalam melakukan **pembinaan, evaluasi, dan monitoring** agar seluruh unit kerja di lingkungan ISI Padangpanjang konsisten dalam menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada publik sesuai standar yang berlaku.

II. Tujuan

1. Menilai kinerja PPID dalam memberikan layanan informasi publik.
2. Menjamin kepatuhan pelaksanaan layanan informasi publik terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan arahan dan pembinaan atas kendala yang dihadapi PPID.
4. Menyusun rekomendasi perbaikan sebagai dasar peningkatan layanan informasi publik di masa mendatang.

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 4. SK Rektor ISI Padangpanjang tentang Penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana.
-





IV. Metode Pelaksanaan

1. **Rapat Koordinasi Internal**
2. **Pemeriksaan Dokumen dan Arsip**, meliputi Daftar Informasi Publik (DIP)
3. **Monitoring Layanan** melalui observasi langsung terhadap sistem layanan PPID (website, desk layanan informasi, media sosial).
4. **Wawancara/FGD** dengan petugas PPID untuk identifikasi kendala teknis dan administratif.
5. **Analisis Statistik** jumlah permohonan informasi, waktu respon, tingkat kepuasan, dan tindak lanjut keberatan (jika ada).



V. Hasil Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring

1. Aspek Kelembagaan

- Struktur PPID telah terbentuk melalui SK Rektor.
- Koordinasi antarunit sudah berjalan, namun masih ada unit yang lambat dalam menyampaikan informasi ke PPID.

2. Aspek Layanan Informasi Publik

- Layanan desk informasi tersedia di kampus dan layanan daring melalui website resmi ISI Padangpanjang.
- Waktu pelayanan rata-rata sesuai standar (maksimal 10 hari kerja), meski ada keterlambatan pada informasi khusus.





3. Aspek Pengelolaan Data dan Dokumentasi

- Daftar Informasi Publik (DIP) sudah diperbarui, namun perlu memperluas kategori informasi, misalnya data riset dan pengabdian masyarakat.
- Informasi dikecualikan sudah ditetapkan, namun perlu sosialisasi internal agar semua unit memahami.

4. Aspek SDM

- Petugas PPID memahami tugas pokoknya, tetapi masih membutuhkan pelatihan terkait manajemen sengketa informasi publik.
- Tugas ganda beberapa petugas menyebabkan keterlambatan pemutakhiran data.

5. Aspek Teknologi dan Media Publikasi

- Website PPID aktif, namun perlu peningkatan kecepatan pemutakhiran data.
 - Media sosial sudah digunakan sebagai sarana publikasi, tetapi belum terintegrasi dengan penuh pada sistem layanan PPID.
-

VI. Kendala yang Dihadapi

1. Belum optimalnya integrasi sistem informasi antarunit.
 2. Kurangnya SDM yang fokus penuh pada layanan informasi publik.
 3. Masih ada keterlambatan pemutakhiran data di website resmi.
 4. Tingkat pemahaman unit kerja terhadap standar informasi publik belum merata.
-

VII. Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Melakukan **bimbingan teknis (bimtek)** keterbukaan informasi publik secara berkala.
 2. Meningkatkan **integrasi sistem layanan digital** dengan unit kerja internal.
 3. Melakukan **evaluasi triwulanan** atas pemutakhiran informasi publik.
 4. Memperkuat koordinasi antarunit agar penyampaian data ke PPID lebih cepat.
 5. Meningkatkan **publikasi proaktif**, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa harus melalui permohonan informasi.
-





VIII. Ringkasan Evaluasi (Tabel)

Tabel
Hasil Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring
Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik
ISI Padangpanjang

Aspek	Temuan Utama	Evaluasi	Tindak Lanjut yang Direkomendasikan
Kelembagaan	Struktur PPID sudah ditetapkan melalui SK Rektor, namun koordinasi antarunit belum optimal	PPID sudah berfungsi, tetapi sebagian unit kerja masih lambat menyerahkan data/informasi	Memperkuat koordinasi antarunit melalui rapat rutin dan surat edaran penguatan tugas
Layanan Informasi	Layanan desk dan daring berjalan, namun belum ada respon dari publik	Umumnya sesuai SOP (≤ 10 hari kerja), namun ada 2–3 kasus yang terlambat	Perlu monitoring harian pada permohonan informasi dan pengendalian waktu respon
Data & Dokumentasi	Daftar Informasi Publik (DIP) sudah tersedia;	DIP masih terbatas, belum mencakup seluruh kategori (penelitian, pengabdian, aset, dsb.)	Melakukan update DIP minimal setiap 6 bulan; sosialisasi internal terkait informasi dikecualikan
SDM	Petugas PPID sudah memahami tugas, tetapi masih rangkap pekerjaan di unit lain	Kinerja cukup baik, namun beban ganda menyebabkan keterlambatan update informasi	Tambah SDM khusus PPID; adakan pelatihan tentang sengketa informasi publik
Teknologi & Media	Website PPID aktif, tetapi update informasi tidak konsisten; media sosial kurang terintegrasi	Teknologi tersedia namun pemanfaatannya belum maksimal	Tingkatkan sistem layanan berbasis elektronik, integrasi media sosial, percepat update website
Monitoring & Evaluasi	Evaluasi dilakukan tahunan, belum ada evaluasi rutin triwulanan	Proses evaluasi masih bersifat administratif, belum ada laporan berbasis kinerja (indikator KPI)	Terapkan evaluasi triwulanan, susun indikator kinerja layanan informasi (IKLI)

